

LAPORAN KINERJA

DPMPTSP

KABUPATEN MAGETAN

Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yaitu meningkatnya investasi daerah.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 20 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Magetan



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

COVER.....	1
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	6
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	7
D. SUMBER DAYA ORGANISASI.....	7
1. Kepegawaian.....	7
2. Sarana dan Prasarana.....	10
3. Anggaran (setelah perubahan).....	10
E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	11
F. LANDASAN HUKUM.....	11
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026).....	14
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD)	15
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	16
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.....	19
B. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029).....	22
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029.....	23
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	24
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.....	27
C. Rencana Kerja Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
D. Rencana Kerja Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	44
1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025.....	44
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir;	54
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;	56
4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Pemerintah Daerah Sekitarnya;	57

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :	57
B. INOVASI TAHUN 2025	62
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025	64
BAB IV PENUTUP	67
A. SIMPULAN	67
B. RENCANA AKSI TAHUN 2026	69
LAMPIRAN	72
A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD	72
B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD	88
C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya	94
D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya	106
E. Pengukuran Kinerja	108
F. Pohon Kinerja	118
G. Rencana Aksi Tahun 2026	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2025 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun n secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;

2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya.

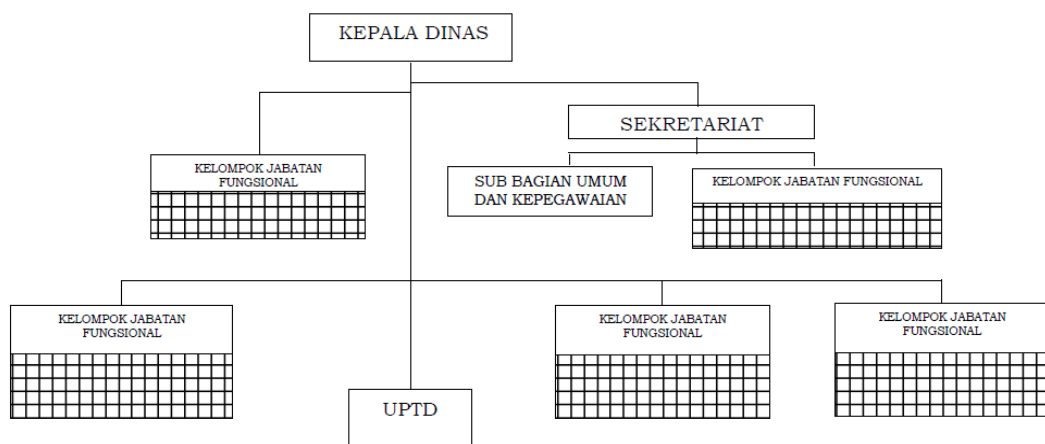
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. UPTD; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh pegawai sebanyak 33 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.

Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	1	0	-1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
5	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
6	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	2	2	0

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
7	Penata Layanan Operasional	1	1	0
8	Pengolah Data dan Informasi	3	1	-2
9	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
10	Operator Layanan Operasional	10	0	-10
11	Operator Layanan Operasional	1	1	0
12	JF Perencana Ahli Muda	1	0	-1
13	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
14	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
15	Pengolah Data dan Informasi	2	0	-2
16	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	2	1	-1
17	JF Penata Perizinan Ahli Madya	2	1	-1
18	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	2	1	-1
19	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	2	2	0
20	JF Penata Perizinan Ahli Muda	3	0	-3
21	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	4	2	-2
22	Penelaah Teknis Kebijakan	12	1	-11
23	Fasilitator Pemerintahan	1	0	-1
24	Pamong Pemerintahan	2	1	-1
25	Pengolah Data dan Informasi	3	1	-2
26	Pengadministrasi Perkantoran	5	4	-1
27	JF Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	-1
28	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	2	2	0
29	JF Pranata Komputer Penyelia	1	0	-1
30	JF Pranata Komputer Mahir	1	0	-1
31	JF Pranata Komputer Terampil	1	1	0
32	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	-1
33	JF Arsiparis Penyelia	1	0	-1
34	JF Arsiparis Mahir	1	0	-1
35	JF Arsiparis Terampil	2	1	-1
36	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	-2
37	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	2	0	-2
38	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	4	2	-2
39	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	6	1	-5
	JUMLAH	92	34	58

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	0
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1
3	Pembina Tk.I/IV-b	0
4	Pembina/IV-a	3
5	Penata Tk.I/III-d	2
6	Penata/III-c	3
7	Penata Muda Tk.I/III-b	1
8	Penata Muda/III-a	17
9	Pengatur Tk.I/II-d	2
10	Pengatur/II-c	2
11	Pengatur Muda Tk.I/II-b	0
12	Pengatur Muda/IIa	2
13	Non ASN	9
	Jumlah	42

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	3
3	Strata 1/Sederajad	21
4	Diploma	4
5	SMA/Sederajad	13
6	SMP/Sederajad	1
7	SD/Sederajad	0
	Jumlah	42

d. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	25
2	Perempuan	17
	Jumlah	42

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025
(Sebelum Penyusutan)

No	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Per 31 Desember Tahun 2025 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	608.800.000			608.800.000
2	Peralatan dan Mesin	5.497.106.209	101.888.000		5.598.994.209
3	Gedung dan Bangunan	1.240.985.047		59.350.000	1.181.635.047
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
5	Aset Tetap Lainnya	500.000			500.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
	Jumlah	7.347.391.256			7.389.929.256

3. Anggaran (setelah perubahan)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025. Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.5.265.218.012,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2025 dan 2026
(Sebelum Penyusutan)

Program	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.337.825.382	4.520.155.634
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	83.665.000	66.000.000

Program	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Promosi Penanaman Modal	236.775.000	202.901.500
Program Pelayanan Penanaman Modal	419.020.150	119.227.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	15.000.000	28.167.500
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	172.932.480	3.940.000

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas dan fungsinya tahun 2025 adalah:

1. Kebijakan pusat yang sering berubah sehingga berpengaruh terhadap penerapan kebijakan di daerah;
2. Belum optimalnya promosi investasi yang dapat dilaksanakan untuk dapat menarik minat investor berinvestasi di Kabupaten Magetan;
3. Belum ditetapkannya kebijakan daerah yang mengatur secara khusus mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal bagi para pelaku usaha;
4. Belum maksimalnya persentase penerbitan perizinan berusaha yang tepat waktu sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
5. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha;
6. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya penyampaian LKPM;
7. Belum adanya kerjasama penanaman modal antara pemerintah daerah dengan dunia usaha berskala besar

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 - 2029; / Peraturan Bupati nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/320/kept./403.013/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN
- 1) Perjanjian Kinerja
 - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mengalami masa transisi dengan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan Bupati Magetan, Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dengan Tujuan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Tujuan ke - 1 RPD	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan
Indikator	:	Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran RPD ke – 2	:	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan
Indikator	:	Nilai Realisasi Investasi
Tujuan Renstra	:	Meningkatnya daya tarik investasi
Indikator	:	Nilai realisasi investasi
Sasaran Renstra Ke 1	:	Meningkatnya jumlah investor
Indikator	:	Jumlah pelaku usaha yang berizin
Sasaran Renstra Ke 2	:	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu
Indikator	:	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan terpadu satu pintu
Sasaran Renstra Ke 3	:	Meningkatnya penyelesaian pengaduan
Indikator	:	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani
Sasaran Renstra Ke 4	:	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah DPMPTSP
Indikator	:	Nilai SAKIP DPMPTSP Magetan

**1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026
(berdasarkan Renstra RPD)**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana Tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan periode 2024-2026 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA			
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi		Nilai Realisasi investasi	Milyar	600	700	800	
		1.1	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	Pelaku Usaha	4.000	4.200	4.300
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	98	98	98
		1.3	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Prosentase	100%	100%	100%
		1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP Magetan	Nilai	94	94,25	94,50

Sumber: Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2024-2026

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

Tujuan Ke 1 RPD	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan					
Sasaran Ke 2 RPD	:	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan					
No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	1.1	Meningkatnya Jumlah Investor	1.1.1	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	1.1.1.1	Peningkatan cakupan substansipameran investasi berskala domestik, nasional dan Internasional
				1.1.2	Mengembangkan data peluang investasi yang prospektif	1.1.2.1	Peningkatan kualitas data potensi investasi, penyusunan sistem informasi peta potensi daerah dan pengkajian IPRO
				1.1.3	Menarik minat investor agar mau berinvestasi	1.1.3.1	Melaksanakan promosi investasi secara masif dan kreatif serta melakukan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.
				1.1.4	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1.1.4.1	Memberikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal
		2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, Penyediaan SDM Kompeten, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan, serta mengembangkan pelayanan yang berstandar mutu serta menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik.
		3.1	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	3.1.1	Meningkatkan pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan penanaman modal untuk	3.1.1.1	Meyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
					mempermudah proses pelayanan		
						3.1.1.2	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
				3.1.2	Menyediakan sarana pengaduan	3.1.2.1	Membangun sarana pengaduan masyarakat
		4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada DPMPTSP	4.1.1	Melaksanakan peningkatan dalam pelaksanaan akuntabilitas Kinerja	4.1.1.1	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
 Tahun 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Investor	1.1	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin adalah jumlah pelaku usaha baru yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	Laporan Perizinan Tahunan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	9 unsur/parameter IKM 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times 25$	Laporan Hasil SKM Tahunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	3.1	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	Prosentase	Jumlah pengaduan yang dapat ditangani dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Tertangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Masuk}} \times 100\%$	Laporan Pengaduan Tahunan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026

B. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Keterkaitan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi Bupati Magetan Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD)	:	MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN		
Misi (RPJMD) Ke 5	:	EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja, dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Mengurangi Pengangguran		
Tujuan (RPJMD) Ke 2	:	Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	Indikator	: Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran (RPJMD) Ke 1	:	Meningkatnya Investasi Daerah	Indikator	: Nilai Realisasi Investasi
Tujuan (Renstra)	:	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Indikator	: Nilai Realisasi Investasi
Sasaran (Renstra) Ke 1	:	Meningkatnya Jumlah Investor	Indikator	: Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru
Sasaran (Renstra) Ke 2	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Indikator	: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran (Renstra) Ke 3	:	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Indikator	: Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan periode 2025-2029. Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Renstra				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi	Milyar	700	710	720	730	740
		1.1 Meningkatkan Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	Pelaku Usaha	6.086	6.100	6.125	6.150	6.175
		1.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	98.92	98.93	98.94	98.95	98.96
		1.3 Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai	95	95.45	95.47	95.50	95.52

Sumber: Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2025-2029

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Tahun 2025-2029

Visi	:	MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN
Misi Ke 2	:	EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja, dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Mengurangi Pengangguran

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Jumlah Investor	Mendorong peningkatan investasi yang banyak menyerap tenaga kerja melalui peningkatan kondisi iklim penanaman modal di daerah yang kondusif didukung dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pemberian fasilitasi dan insentif penanaman modal, serta pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi daerah secara masif.	Melaksanakan promosi investasi secara masif dan kreatif serta melakukan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
			Meningkakan kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam rangka mendukung riset potensi dan peluang investasi, pengkajian kebijakan terkait penanaman modal, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan data sektor unggulan yang ada di Kabupaten Magetan	Meningkatkan penyelenggaraan forum investasi. dan pemanfaatan platform digital untuk memperkenalkan potensi daerah dan sektor unggulan kepada investor
			Penguatan informasi dan promosi investasi dengan menyusun dan memperbarui profil potensi dan peluang investasi, serta melaksanakan promosi investasi baik secara langsung maupun melalui media masa.	Peningkatan kualitas data potensi investasi, penyusunan sistem informasi peta potensi daerah dan pengkajian IPRO
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Memfaatkan digitalisasi dan integrasi layanan perizinan dengan memanfaatkan sistem <i>online single submission</i> (OSS) dalam pelayanan perizinan, monitoring serta evaluasi dan pelaporan bidang perizinan.	Meyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melaksanakan reformasi regulasi dan penyederhanaan proses dengan meninjau regulasi yang ada terkait perizinan berusaha maupun penanaman modal baik peraturan daerah maupun peraturan bupati serta melakukan peninjauan kembali dan pembaruan standart operasional prosedur (SOP)	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, Penyediaan SDM Kompeten, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan, serta mengembangkan pelayanan yang berstandar mutu
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan dengan mengikuti pelatihan teknis bagi petugas pelayanan dan menempatkan petugas yang kompeten sehingga mampu memberikan layanan, fasilitasi serta konsultasi bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Melaksanakan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan akuntabilitas Kinerja	Melaksanakan kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan target yang telah ditetapkan

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Investor	1.1	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	Pelaku Usaha	Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru merupakan Penanam Modal baru yang berinvestasi di Kabupaten Magetan pada Tahun n. Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru dihitung dengan melihat jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru yang diterbitkan oleh sistem OSS pada Tahun n	Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru Tahun N	OSS (<i>Online Single Submission</i>)
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	2.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	Nilai IKM merupakan data mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah Indeks Per Parameter}}{\text{Jumlah Parameter}} \times 25$ <p>9 Parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 	Laporan Hasil SKM DPMPSTP Tahun n.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
					9. Sarana dan Prasarana	
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	3.1	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai	Nilai SAKIP adalah skor atau predikat yang diperoleh instansi pemerintah dalam penilaian efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Nilai SAKIP <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 	Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
					<p>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

C. Rencana Kerja Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 :

Tabel 2.9
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Sat.	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi			Nilai Realisasi Investasi	Milyar	700
		1.1	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	Pelaku Usaha	4.200
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai IKM Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	98
		1.3	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	Persentase	100%
		1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP Magetan	Nilai	94.25

Sumber: Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan :

Tabel 2.10
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN DPMPTSP Terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPTSP	Indeks	88	4.554.299.616
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	18	38.872.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	5.000.000
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	11	33.872.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Persentase	100	2.971.663.192
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	2.968.663.192
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	12	3.000.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Menerima Pelayanan Kepegawaian Sesuai Prosedur	orang	38	54.518.000
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	38	54.518.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	84	488.751.288
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	26.500.000
1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	223.286.288
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	12	30.000.000
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	12	62.880.000
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	12	16.585.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen	12	9.500.000
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	120.000.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36	771.045.136
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	182.770.136
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	60.000.000
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	528.275.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Unit	18	229.450.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	16	100.000.000
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	129.450.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi Yang Disusun	Persentase	100	24.667.000
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Dokumen	-	-
2.1.1	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	-	-
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Yang Disusun	Dokumen	1	24.667.000
2.2.1	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah Yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	Daerah	1	24.667.000
3	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Cakupan Potensi Yang Dipromosikan	Persentase	100	466.153.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kegiatan	8	466.153.000
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	8	466.153.000
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian Penanaman Modal	Persentase	100	20.000.000
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Fasilitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Usaha	250	20.000.000
4.1.1	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	-	-
4.1.2	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	250	10.000.000
4.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	50	10.000.000
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur	Persentase	100	202.217.000
5.1	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Dokumen	2053	202.217.000
5.1.1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	8.662.000
5.1.2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha	Pelaku Usaha	2000	146.179.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
		Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik			
5.1.3	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	40	31.736.000
5.1.4	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	12	15.640.000
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Sistem Informasi Yang Dikembangkan	Persentase	100	48.255.000
6.1	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sistem Informasi Pengelolaan Data Yang Dikembangkan	Dokumen	1	48.255.000
6.1.1	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	48.255.000

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 13 bulan januari tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	Pelaku Usaha	4.200
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai IKM Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	98
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	Presentase	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP Magetan	Nilai	94.25

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025

D. Rencana Kerja Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 3 bulan November tahun 2025 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2025. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi	Milyar	700	
		1.1	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru	Pelaku Usaha	6086
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	98.92
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai	95

Sumber: Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian rencana kerja perubahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan :

Tabel 2.13
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan ; Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	Indeks; Persentase	88; 98.66	4.337.825.382
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	18	27.508.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	675.000
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	11	26.833.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Persentase	100	2.909.289.588,50
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	2.906.289.588,50
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	12	3.000.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Layanan Kepegawaian Sesuai Prosedur	orang	38	54.518.000
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	38	54.518.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum	Paket	84	412.215.345,50
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	26.500.000
1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	187.452.990,50
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	12	30.000.000
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	12	62.880.000
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	12	17.882.355

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen	12	9.500.000
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	78.000.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	36	644.844.448
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	162.769.448
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	60.000.000
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	422.075.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	18	289.450.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	16	100.000.000
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	189.450.0000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi	Persentase	100	83.665.000
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal			
2.1.1	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	-	
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Potensi / Peluang Penanaman Modal yang Telah di Petakan	Persentase	100	83.665.000
2.2.1	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah Yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	Daerah	1	83.665.000
3	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Potensi /Peluang Penanaman	Persentase	100	236.775.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
		Modal yang di Promosikan			
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kegiatan	5	236.775.000
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	236.775.000
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha	Persentase	100	15.000.000
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal yang disusun	Laporan	4	15.000.000
4.1.1	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	-	
4.1.2	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	-	
4.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	50	15.000.000
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan	Persentase	100	419.020.150
5.1	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Perizinan yang di Terbitkan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	Persentase	100	419.020.150
5.1.1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang	Dokumen	1	3.229.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
		Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			
5.1.2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	6086	315.259.000
5.1.3	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	300	87.022.150
5.1.4	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	12	13.440.000
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	172.932.480
6.1	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedia dan Terupdate	Persentase	100	172.932.480
6.1.1	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	172.932.480

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 3 bulan november tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	Pelaku Usaha	6086
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	98.92
3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai	95

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025

Beberapa perubahan kebijakan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah:

1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Kinerja beserta dengan indikator dan target yang disesuaikan rancangan awal rencana strategis Tahun 2025-2029.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	$75\% \text{ s.d } < 100\%$	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	$55\% \text{ s.d } < 75\%$	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	$< 55\%$	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja (Induk) Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	4200	6149	146	Sangat Berhasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai IKM Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98	98.92	101	Sangat Berhasil
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%	100	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP Magetan	94.25	95.43	101	Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	6086	6149	101	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.92	98.94	100	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	95	95.43	101	Sangat Berhasil

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	<u>Sasaran Strategis 1 :</u> Meningkatnya Jumlah Investor						
	<u>Indikator Kinerja Sasaran :</u> Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru				6086	6149	101.04%
	<u>Program (1.1)</u> Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	83,665,000.00	81,442,000.00	97.34%			
	<u>Sasaran Program (1.1)</u> Meningkatnya iklim investasi di daerah						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u> Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi				100	157	157.00%
	<u>Kegitana (1.1.1) :</u> Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	83,665,000.00	81,442,000.00	97.34%			
	<u>Sasaran Kegiatan (1.1.1)</u> Terpetakannya Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Magetan						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Prosentase Potensi / Peluang Penanaman Modal yang Telah di Petakan				100	100	100.00%
	<u>Rincian Output (1.1.1.1)</u> Terlaksananya Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah	83,665,000.00	81,442,000.00	97.34%	1	1	100.00%
	<u>Program (1.2)</u> Program Program Promosi Penanaman Modal	236,775,000.00	230,766,100.00	97.46%			
	<u>Sasaran Program (1.2)</u> Meningkatnya Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u> Prosentase Potensi/ Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan				100	100	100.00%
	<u>Kegitana (1.2.1) :</u>	236,775,000.00	230,766,100.00	97.46%			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
	<u>Sasaran Kegiatan (1.2.1)</u> Terlaksananya Promosi Potensi/ Peluang Investasi						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal				5	5	100.00%
	<u>Rincian Output (1.2.1.1)</u> Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	236,775,000.00	230,766,100.00	97.46%	5	5	100.00%
	<u>Program (1.3)</u> Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	15,000,000.00	14,465,000.00	96.43%			
	<u>Sasaran Program (1.3)</u> Meningkatnya Ketertiban Kegiatan Berusaha di Daerah						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha				100	100	100.00%
	<u>Kegitana (1.3.1) :</u> Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000.00	14,465,000.00	96.43%			
	<u>Sasaran Kegiatan (1.3.1)</u> Terlaksananya Pelaporan Kinerja Penanaman Modal						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal yang disusun				4	4	100.00%
	<u>Rincian Output (1.3.1.1)</u> Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal yang dilakukan Pelaku Usaha	15,000,000.00	14,465,000.00	96.43%	50	50	100.00%
2	<u>Sasaran Strategis 2 :</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima						
	<u>Indikator Kinerja Sasaran :</u> Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu				90.92	90.94	100.02%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<u>Program (2.1)</u> Program Pelayanan Penanaman Modal	419,020,150.00	399,438,327.00	95.33%			
	<u>Sasaran Program (2.1)</u> Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u> Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan Berusaha				100	100	100.00%
	<u>Kegiatan (2.1.1)</u> Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	419,020,150.00	399,438,327.00	95.33%			
	<u>Sasaran Kegiatan (2.1.1)</u> Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan SOP						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Persentase Dokumen Perizinan yang di Terbitkan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP				100	97.46	97.46%
	<u>Rincian Output (2.1.1.1)</u> Terlaksananya Koordinasi terkait Perizinan Berusaha	3,299,000.00	3,150,000.00	95.48%	1	1	100.00%
	<u>Rincian Output (2.1.1.2)</u> Terlaksananya Pemberian Pelayanan Perizinan kepada Pemohon	315,259,000.00	306,788,950.00	97.31%	6086	6149	101.04%
	<u>Rincian Output (2.1.1.3)</u> Tersedianya Layanan Konsultasi dan Informasi Terkait Perizinan dan Penanaman Modal	87,022,150.00	77,642,877.00	89.22%	300	300	100.00%
	<u>Rincian Output (2.1.1.4)</u> Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	13,440,000.00	11,856,500.00	88.22%	12	12	100.00%
	<u>Program (2.2)</u> Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	172,932,480.00	167,080,000.00	96.62%			
	<u>Sasaran Program (2.2)</u> Meningkatnya Ketersediaan Data dan Ketersediaan Sistem Informasi						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<u>Indikator Kinerja Program :</u> Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				100	100	100.00%
	<u>Kegiatan (2.2.1)</u> Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172,932,480.00	167,080,000.00	96.62%			
	<u>Sasaran Kegiatan (2.2.1)</u> Terkelola dan terpeliharanya Data dan Sistem Informasi						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedia dan Terupdate				100	100	100.00%
	<u>Rincian Output (2.2.1.1)</u> Terkelolanya Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	172,932,480.00	167,080,000.00	96.62%	2	2	100.00%
3	<u>Sasaran Strategis 3 :</u> Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan						
	<u>Indikator Kinerja Sasaran :</u> Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan				95	95.43	100.45%
	<u>Program (3.1)</u> Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	4,337,825,382.00	4,033,070,859.00	92.97%			
	<u>Sasaran Program (3.1)</u> Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien						
	<u>Indikator Kinerja Program 3.1.1 :</u> Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan				88	88	100.00%
	<u>Indikator Kinerja Program 3.1.2 :</u> Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran				98.66	96.78	98.09%
	<u>Kegiatan (3.1.1)</u> Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,508,000.00	26,650,750.00	96.88%			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<u>Sasaran Kegiatan (3.1.1)</u> Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu				100	100	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.1.1)</u> Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	675,000.00	675,000.00	100.00%	7	7	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.1.2)</u> Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,833,000.00	25,975,750.00	96.81%	11	11	100.00%
	<u>Kegiatan (3.1.2)</u> Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,909,289,588.50	2,662,386,001.00	91.51%			
	<u>Sasaran Kegiatan (3.1.2)</u> Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah				100	93.56	93.56%
	<u>Rincian Output (3.1.2.1)</u> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2,906,289,588.50	2,659,386,001.00	91.50%	23	23	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.2.2)</u> Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	12	12	100.00%
	<u>Kegiatan (3.1.3)</u> Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54,518,000.00	53,791,100.00	98.67%			
	<u>Sasaran Kegiatan (3.1.3)</u> Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Jumlah Pegawai yang Menerima Layanan Kepegawaian				45	45	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.3.1)</u> Terlaksananya Bimbingan Tekns Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Pegawai	54,518,000.00	53,791,100.00	98.67%			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<u>Kegiatan (3.1.4)</u> Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	412,215,345.50	392,499,693.00	95.22%			
	<u>Sasaran Kegiatan (3.1.4)</u> Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Administrasi Umum				12	12	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.4.1)</u> Tersedianya Perlengkapan Kelistrikan dan Penerangan Kantor	26,500,000.00	25,374,020.00	95.75%	12	12	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.4.2)</u> Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	187,452,990.50	178,887,283.00	95.43%	12	12	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.4.3)</u> Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	30,000,000.00	29,226,680.00	97.42%	12	12	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.4.4)</u> Tersedianya Logistik Kantor	62,880,000.00	56,209,950.00	89.39%	12	12	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.4.5)</u> Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	17,882,355.00	15,990,900.00	89.42%	12	12	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.4.6)</u> Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	9,500,000.00	8,880,000.00	93.47%	12	12	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.4.7)</u> Tersedianya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	78,000,000.00	77,930,860.00	99.91%	12	12	100.00%
	<u>Kegiatan (3.1.5)</u> Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644,844,448.00	614,498,735.00	95.29%			
	<u>Sasaran Kegiatan (3.1.5)</u> Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36	36	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.5.1)</u> Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	162,769,448.00	143,968,790.00	88.45%	12	12	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.5.2)</u>	60,000,000.00	58,390,900.00	97.32%	12	12	100.00%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor						
	<u>Rincian Output (3.1.5.3)</u> Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	422,075,000.00	412,139,045.00	97.65%	12	12	100.00%
	<u>Kegiatan (3.1.6)</u> Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289,450,000.00	283,244,580.00	97.86%			
	<u>Sasaran Kegiatan (3.1.6)</u> Terpeliharanya Barang Milik Daerah						
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara				18	18	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.6.1)</u> Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100,000,000.00	97,111,180.00	97.11%	16	16	100.00%
	<u>Rincian Output (3.1.6.2)</u> Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	189,450,000.00	186,133,400.00	98.25%	2	2	100.00%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir;

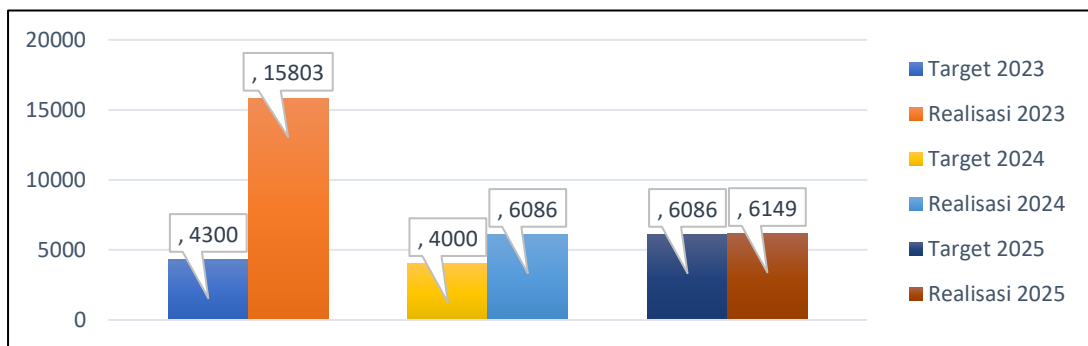
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	4300	15803	368	4000	6.086	152		6149	101
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84	98.04	117	98	98.92	101	98.92	98.94	100
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	89	93.53	105	94	94.91	101	95	95.43	101

Perbandingan capaian kinerja pada masing – masing sasaran startegis dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah Investor

Grafik 3.3.1
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 1

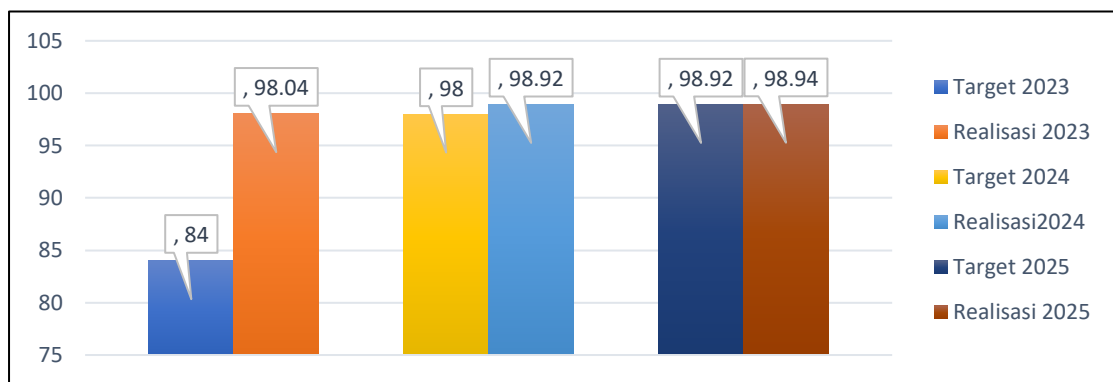


Pada realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya jumlah investor dengan indikator kinerja pelaku usaha yang berizin di tahun 2025 nilai realisasinya mencapai 6149 dari yang targetkan sebanyak 6086 investor. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya berdasarkan dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa jumlah pelaku usaha berizin baru di Kabupaten Magetan selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2023 15.803 pelaku usaha, tahun 2024 6.086 pelaku usaha, dan tahun 2025 6149 pelaku usaha. Pada grafik terlihat bahwa jumlah pelaku usaha berizin baru mengalami fluktuasi, hal tersebut disebabkan karena dalam melakukan perizinan

pelaku usaha hanya perlu sekali melakukan pengurusan nomor induk berusaha (NIB) sebagai legalitas usahanya. Pelaku usaha (investor) di Kabupaten Magetan terdiri atas penanam modal yang didominasi oleh usaha skala mikro kecil dan menengah serta besar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan terus berusaha melaksanakan promosi untuk menarik minat pelaku usaha baru untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Magetan serta melakukan inovasi – inovasi dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus perizinan usahanya.

b. Realisasi Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima

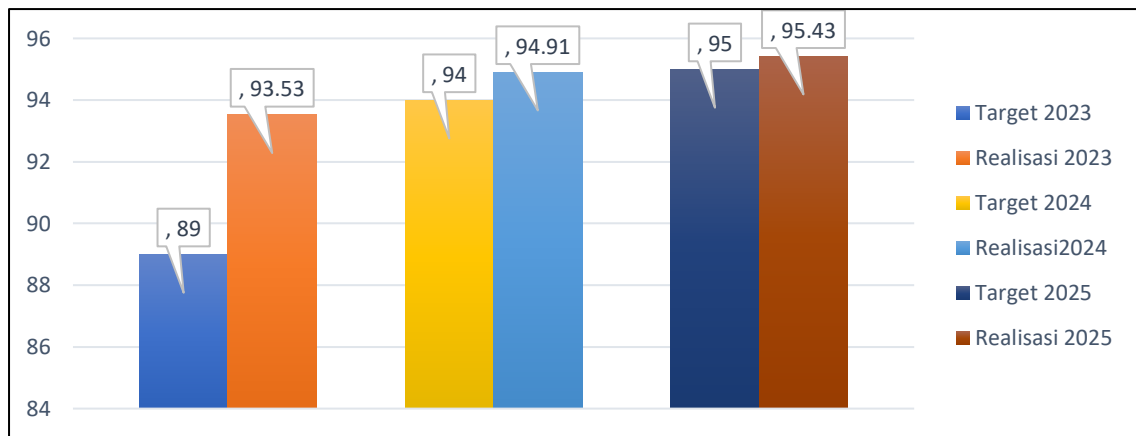
Grafik 3.3.2
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 2



Pada realisasi kinerja sasaran kedua meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu dengan indikator kinerja Nilai IKM Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun 2025 realisasinya sebesar 98,94 dari yang ditargetkan sebesar 98.92. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya berdasarkan dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa kualitas pelayanan pelayanan terpadu satu pintu mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan nilai kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2023 skor IKM 98,04, tahun 2024 skor IKM 98,92 dan tahun 2025 skor IKM 98,94. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan para pengguna layanan dengan meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan. Adanya hal tersebut diharapkan mampu mempertahankan serta meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

c. Realisasi Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan

Grafik 3.3.3
Capaian Realisasi Sasaran Stategis 3



Pada realisasi kinerja sasaran keempat meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada DPMPTSP Magetan dengan indikator nilai SAKIP Magetan. Pada tahun 2025 realisasinya 95.43 dari yang ditargetkan 95 dengan prosentase capaian 101 % dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya berdasarkan dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa pada setiap tahunnya nilai kinerja penyelenggaraan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah selalu mengalami kenaikan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya dengan melakukan penyelarasan dokumen kinerja dari mulai dokumen perencanaan hingga pelaporan kinerja yang telah dilaksanakan.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

Tabel 3.6
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	6149	6200	99.18%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.94	98.97	99.97%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	95.43	95.55	99.87%

Pada tabel diatas yang membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir periode rencana startegis dapat dilakukan analisa bahwa realisasi kinerja pada tahun 2025 rata – rata telah mencapai 99% dari target renstra yang ditetapkan.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Pemerintah Daerah Sekitarnya;

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	6.149	3.952.018	0.16

Perbandingan kinerja daerah dengan kinerja nasional diperlihatkan untuk mengetahui seberapa besaran sumbangan nilai target capaian yang diperoleh oleh Kabupaten Magetan terhadap realisasi kinerja secara Nasional. Jumlah pelaku usaha/investor baru secara nasional berdasarkan data diinformasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM selama periode bulan januari s.d desember tahun 2025 adalah sebanyak 3.952.018, dari capaian nasional tersebut Kabupaten Magetan berkontribusi sebesar 0.16% dengan jumlah pelaku usaha baru yang masuk di Kabupaten Magetan selama tahun 2025 sebanyak 6.149 pelaku usaha. Selain itu jika dibandingkan dengan beberapa Pemerintah Daerah Sekitar yang melakukan publikasi terkait pelaku usaha baru yang masuk pada Tahun 2025 diperoleh data sebagai berikut Kabupaten Ngawi 6.341 pelaku usaha, Kota Madiun 4.668 pelaku usaha dan Kabupaten Ponorogo 5.948 pelaku usaha, Kabupaten Pacitan 4.066 pelaku usaha dan Kabupaten Madiun 5.985 pelaku usaha. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha baru yang masuk di Kabupaten Magetan jumlahnya hampir sama bahkan melebihi capaian yang ada di kabupaten/kota sekitar.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

Tabel 3.8
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	6086	6149	101	- Peningkatan minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan; - Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
					<p>mengurus perizinan usahanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Informasi mengenai potensi & peluang investasi di Kab. Magetan yang dapat diakses secara online melalui website SIPPINTAR; - Pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan <i>Pepeling</i> dan <i>weekendservice</i> yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan usahanya; - Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Magetan untuk menarik minat investor.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.92	98.94	100	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan pelayanan perizinan melalui perkembangan teknologi dan informasi yang disediakan; - Peningkatan sarana dan prasarana di penunjang pelayanan kepada Masyarakat melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan; - Ketersediaan Informasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah di akses oleh Masyarakat baik secara online maupun offline; - Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan.
Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Dinas	95	95.43	101	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketertiban dalam pengelolaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan				dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diperjanjikan tentunya tidak lepas dari adanya factor – factor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil analisis mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang dicantumkan dalam tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam mencapai kinerja sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya jumlah investor dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :
 - a. Semakin banyaknya pelaku usaha yang berminat untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Magetan, hal ini sebagai dampak dari giat promosi yang dilakukan.
 - b. Peningkatan kesadaran para pelaku usaha untuk mengurus legalitas usahanya berupa perizinan usaha. Pelaku usaha mulai memahami pentingnya legalitas ijin dari suatu usaha karena perijinan juga merupakan salah aspek syarat yang perlu dilengkapi pelaku usaha agar bisa melakukan akses permodalan melalui perbankan.
 - c. Ketersediaan Informasi mengenai potensi & peluang investasi di Kab. Magetan yang dapat diakses secara online melalui website SIPPINTAR. Kecepatan dan kemudahan akses terkait informasi menjadi hal penting yang diperlukan oleh para calon investor. Dengan adanya inovasi sippintar ini mempermudah investor untuk mengetahui potensi apa saja yang ada di Kabupaten Magetan.
 - d. Pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan *Pepeling* (pelayanan perizinan keliling) ke kecamatan dan lokasi strategis lainnya di Kabupaten Magetan dan *weekendservice* (pelayanan perizinan dihari sabtu) yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan usahanya diluar hari kerja efektif.
 - e. Pelaksanaan promosi melalui keikutsertaan dalam kegiatan pameran investasi, expo dan promosi melalui media iklan terkait potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Magetan turut berdampak pada peningkatan jumlah pelaku usaha baru yang ada di Kabupaten Magetan.

2. Keberhasilan dalam mencapai kinerja sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :
 - a. Adanya kemudahan pelayanan perizinan melalui perkembangan teknologi dan informasi yang disediakan berdampak pada meningkatnya kepuasan pelanggan karena perizinan dapat dilakukan secara elektronik, kapan saja serta dimana saja.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana di penunjang pelayanan kepada Masyarakat melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representative dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan yang melakukan pelayanan perizinan.
 - c. Ketersediaan Informasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah di akses oleh Masyarakat baik secara online maupun offline;
 - d. Adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu hal yang menunjang kepuasan Masyarakat. Pegawai yang professional mampu memberikan pelayanan prima pada pelanggan.
3. Keberhasilan dalam mencapai kinerja sasaran strategis ketiga meningkatnya akuntabilitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja di DPMPSTP dipengaruhi oleh adanya peningkatan pegawai dalam ketertiban pengelolaan dokumen dokumen berkaitan perencanaan, evaluasi, serta pelaporan kinerja.

Meskipun seluruh target kinerja telah tercapai, namun pencapaian yang telah dilakukan tidak lepas dari permasalahan yang muncul dalam proses pencapaian kinerja. Permasalahan yang muncul tersebut sesegera mungkin diselesaikan dengan melakukan alternatif penyelesaian masalah agar tidak berdampak pada pencapaian target kinerja. Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	Kegiatan pameran promosi terbatas pada undangan dari pusat maupun provinsi	Melakukan inovasi promosi melalui media masa berupa pemasangan baliho promosi investasi diluar daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Adanya perizinan yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi yang pemohon ajukan lewat loket DPMPTSP sehingga tidak dapat diproses	Membuat loket pelayanan khusus perizinan pusat dan provinsi serta melakukan pendampingan pengurusan perizinan yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi.
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya memahami tusi	Memberikan bimbingan teknis/sosialisasi pada pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas dalam memahami tusi

Dalam mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan terdapat beberapa permasalahan yang harus diberi alternatif solusi agar tidak menghambat pencapaian kinerja. Sesuai tabel diatas permasalahan dan alternatif solusi yang diambil dalam pencapaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada pencapaian sasaran pertama yaitu terkait meningkatnya jumlah investor, terdapat permasalahan yaitu terkait kegiatan pameran promosi berskala besar yang dapat diikuti terbatas pada undangan pemerintah pusat dan provinsi sehingga kurang maksimal dalam rangka menarik investor baru untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut dicari alternatif penyelesaian permasalahan dengan melakukan inovasi promosi investasi melalui pemasangan baliho diluar daerah, tujuan inovasi ini agar informasi mengenai potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Magetan tetap terinformasikan pada para investor dan dapat menarik calon investor baru.
- b. Pada pencapaian sasaran kedua yaitu terkait meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima, terdapat permasalahan dimana terdapat pelaku usaha yang mengurus perizinan yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi di DPMPTSP, sehingga perizinan tersebut tidak dapat diproses. Untuk menyikapi permasalahan tersebut dicari alternatif penyelesaian permasalahan yaitu dengan membuat loket pelayanan khusus untuk pendampingan pengurusan perizinan kewenangnya pusat dan provinsi melalui aplikasi pusat dan provinsi, serta melakukan pendampingan pengurusan ke tingkat pusat dan provinsi apabila pemohon meminta pendampingan jika terdapat kendala dalam perizinannya.
- c. Pada pencapaian sasaran ketiga terkait meningkatnya akuntabilitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan, terdapat permasalahan terkait Masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya memahami

tusi Untuk menyikapi permasalahan tersebut dicari alternatif penyelesaian permasalahan yaitu dengan Memberikan bimbingan teknis/sosialisasi pada pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas dalam memahami tusi.

B. INOVASI TAHUN 2025

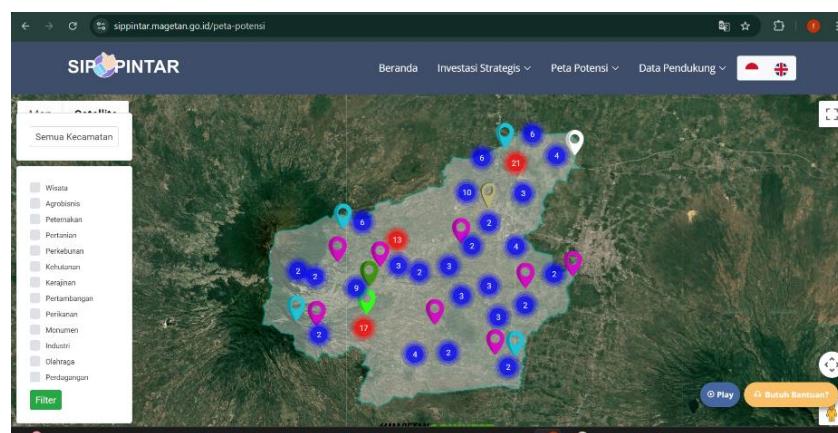
Selama Tahun 2025, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan antara lain :

1. Layanan *Weekend Service*.



Layanan *weekend service* ini dilaksanakan dengan membuka layanan perizinan pada hari Sabtu untuk memudahkan masyarakat atau pelaku usaha yang mengalami keterbatasan waktu dalam mengurus izin usaha pada hari kerja.

2. SIP-PINTAR (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah).



SIP-PINTAR merupakan sebuah sistem informasi berbasis situs (*website*) yang digunakan untuk menyediakan data dan informasi mengenai potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Magetan yang dapat diakses oleh para calon investor melalui laman www.sippintar.magetan.go.id dimana saja dan kapan saja.

3. Jempol Peri (Jemput Bola untuk Peningkatan Realisasi Investasi).



Inovasi ini membantu dan mendampingi para pelaku usaha di Kabupaten Magetan dalam rangka peningkatan dan pendataan realisasi investasi. Inovasi Jempol Peri diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM secara periodik guna mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan melalui sektor investasi.

4. Pepeling (Pelayanan Perizinan Keliling).



PEPELING (Pelayanan Perizinan Keliling) yaitu inovasi pelayanan perizinan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perizinan jemput bola ke tempat aktivitas masyarakat, seperti pasar tradisional di wilayah Kabupaten Magetan. Dengan adanya kegiatan PEPELING ini masyarakat yang berada di wilayah jauh dari perkotaan dan memiliki usaha dapat memanfaatkan untuk mengurus perizinan usahanya secara mudah, terjangkau serta gratis.

5. LAJIK (Layanan Antar Jemput Izin Khusus).

Dalam rangka memberikan kemudahan dan pemerataan akses layanan perizinan bagi kaum rentan (difabel, lansia, ibu hamil), DPMPTSP Kabupaten Magetan

menginisiasi program LAJIK melalui pembuatan sistem informasi/aplikasi LAJIK. LAJIK ini sangat membantu bagi kaum rentan dalam pelaksanaan proses pengurusan perizinan. Pemohon yang membutuhkan layanan LAJIK bisa mengajukan permohonan melalui sistem yang telah disediakan.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

Selama Tahun 2025, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 antara lain:

1. Penghargaan inovasi SIPPINTAR (Sistem Informasi Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah) dari Bupati Magetan sebagai Inovasi Daerah dengan nilai kematangan memadai dalam rangka Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025



2. Penghargaan 2025 dari Bupati Kabupaten Magetan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Dinas dengan Predikat “Pelayanan Prima” Tahun 2025.



3. Predikat *Outstanding Public Service Innovation* tahun 2025 Provinsi Jawa Timur melalui Inovasi Jemput Bola untuk Peningkatan Realisasi Investasi (Jempol Peri) pada gelaran Penganugerahan Kovablik (Kompetisi Inovasi Publik) 2025.



Melalui pameran Kovablik ini, DPMPPTSP Kabupaten Magetan berkesempatan memperkenalkan layanan dan produk unggulan Kabupaten Magetan kepada masyarakat luas sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan pelayanan public yang cepat, mudah, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Penghargaan yang di terima oleh Klinik Madena Husada sebagai Juara Harapan II Kategori Usaha Kecil dalam ajang Investment Award 2025 Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Grand City Surabaya.



Prestasi ini tidak lepas dari peran DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha, khususnya dalam pemenuhan perizinan berusaha serta kepatuhan terhadap regulasi. Melalui pendampingan ini, DPMPTSP Kabupaten Magetan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Investor

- Sasaran ke-1 Meningkatnya Jumlah Investor terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 101% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 3 (tiga) Program yang terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima

- Sasaran ke-2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target dan seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Kegiatan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan

- Sasaran ke-3 Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 101% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target dan seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	6086	6149	101
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.92	98.94	100
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	95	95.43	101
Capaian Kinerja				100,67
				SANGAT BAIK

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100.67% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.926.242.286 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 7.26%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini turun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 12.84 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah perubahan indikator kinerja dan perubahan perhitungan atau formulasi perhitungan capaian kinerja, berkaitan dengan permasalahan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan berupaya untuk meningkatkan dan melakukan inovasi dalam rangka pencapaian kinerja sesuai dengan indikator dan formulasi baru yang telah ditetapkan.

Serapan anggaran tahun 2025 ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3.65 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah adanya sisa belanja yang lebih besar dari tahun sebelumnya dimana berasal dari harga negosiasi saat pengadaan barang dan jasa, serta sisa pagu gaji dan tunjangan pegawai yang jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2026

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2025 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD Teknis pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan sehingga mempermudah dalam pelayanan perizinan b. Melakukan updating regulasi secara berkala agar mampu memberikan pelayanan perizinan yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pusat maupun daerah c. Melaksanakan inovasi pelayanan publik dalam rangka memberikan kemudahan perizinan.
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan sarana dan prasarana yang representative dalam rangka memberikan kenyamanan bagi pelanggan b. Mengembangkan kompetensi aparatur pemberi layanan agar mampu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
		memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. c. Melaksanakan pengembangan layanan perizinan secara digital agar perizinan dapat diproses secara online
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	a. Meningkatkan ketertiban pengadministrasian dokumen terkait akuntabilitas kinerja b. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas kinerja

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN n+1				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	1500	1500	1500	1650	6150
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu				98.94	98.94
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan				95.45	95.45

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, 20 Februari 2026


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN

S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196712241988092001

LAMPIRAN

A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD

1. Matriks Renstra RPD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang berizin	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang berizin tahunan	Meningkatnya realisasi investasi	4000	4200	4300	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun
									Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas /Insentif Penanaman Modal
									Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
									Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
									Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang disusun
									Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
									Sub Kegiatan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
									Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Cakupan potensi yang dipromosikan
									Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
									Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Dokumen
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Penanaman Modal
									Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
									Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
									Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
									Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	indeks	Nilai IKM dihitung dengan melakukan survey pada Masyarakat menggunakan 9 unsur/ parameter IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	98	98	98	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur.
									Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
									Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
									Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha
									Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi yang dikembangkan
									Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sistem informasi pengelolaan data yang dikembangkan
									Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	Prosentase	Prosentase pengaduan yang tertangani dihitung dengan membandingkan jumlah pengaduan yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	100%	100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur.
									Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
									Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP Magetan	Skor	Nilai diperoleh dari laporan hasil evaluasi (LHE) inspektorat pada tahun n	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	94	94.25	94.50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan Asn Dpmptsp Terhadap Layanan Kesekretariatan Dpmptsp
									Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu
									Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah
									Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
									Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
									Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur
									Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
									Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
									Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
									Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
									Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Matriks Renstra RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang berizin tahun n	Meningkatnya realisasi investasi	6.086	6.100	6.125	6.150	6.175	6.200	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi
												Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal
												Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
												Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Potensi / Peluang Penanaman Modal yang Telah di Petakan
												Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
												Sub Kegiatan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi
												Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan
												Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
												Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
												Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman	Jumlah dokumen strategi Promosi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanaman Modal Kab/Kota Dokumen
												Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha
												Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal yang disusun
												Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
												Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
												Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Skor	Nilai IKM dihitung dengan melakukan survey pada Masyarakat menggunakan 9 unsur/parameter IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	98.92	98.93	98.94	98.95	98.96	98.97	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan
												Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Perizinan yang di Terbitkan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP
												Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
												Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
												Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha
												Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
												Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedia dan Terupdate
												Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian	Jumlah Data dan Informasi Perizinan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai diperoleh dari laporan hasil evaluasi (LHE) inspektorat pada tahun n	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	95	95.45	95.47	95.50	95.52	95.55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan ; Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran
												Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu
												Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
												Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
												Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
												Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi dengan Baik
												Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
												Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Layanan Kepegawaian Sesuai Prosedur
												Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
												Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum
												Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
												Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
												Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
												Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
												Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
												Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
												Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milih Daerah yang disediakan
												Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
												Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
												Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan
												Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
												Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan
												Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Kebijakan	Target						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
												Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya
												Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi

B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD

1. Indikator Kinerja Utama RPD

NO.	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	<p>Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin</p> <p>Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin adalah jumlah pelaku usaha baru yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	Laporan Perizinan Tahun n	DPMPTSP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times 25$ <p>9 unsur/parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Persyaratan 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9 Sarana dan Prasarana 	Laporan Hasil SKM Tahun n	DPMPTSP

NO.	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Tertangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Masuk}} \times 100\%$ <p>Jumlah pengaduan yang dapat ditangani dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan</p>	Laporan Pengaduan Tahun n	DPMPTSP

2. Indikator Kinerja Utama RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	<p>Formulasi :</p> <p>Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru Tahun N</p> <p>Definisi :</p> <p>Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru merupakan Penanam Modal baru yang berinvestasi di Kabupaten Magetan pada Tahun n. Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru dihitung dengan melihat jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru yang diterbitkan oleh sistem OSS pada Tahun n</p>	OSS (Online Single Submission)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Tipe Perhitung : Non Kumulatif		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<p>Formulasi :</p> $\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah Indeks Per Parameter}}{\text{Jumlah Parameter}} \times 25$ <p>9 Parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Persyaratan 11. Sistem mekanisme dan prosedur 12. Waktu penyelesaian 13. Biaya/tarif 14. Produk spesifikasi jenis pelayanan 15. Kompetensi pelaksana 16. Perilaku pelaksana 17. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 18. Sarana dan Prasarana <p>Definisi :</p> <p>Nilai IKM merupakan data mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara</p>	Laporan Hasil SKM DPMPTSP Tahun n	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP	<p>Formulasi :</p> <p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 5. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 6. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p>	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>4. Pengukuran kinerja telah dilakukan</p> <p>5. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</p> <p>6. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <p>5. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika</p> <p>6. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap</p> <p>7. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan</p> <p>8. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya</p> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <p>7. Kelengkapan dokumen SAKIP</p> <p>8. Keselarasan dokumen perencanaan</p> <p>9. Ketercapaian Kinerja</p> <p>10. LHE ditindaklanjuti</p> <p>11. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE</p> <p>12. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</p> <p>Definisi :</p>		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Nilai SAKIP adalah skor atau predikat yang diperoleh instansi pemerintah dalam penilaian efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>		

C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya

1. Matriks Renja Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi Yang Disusun	100	%	100	%	24.667.000	Bidang Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Yang Disusun	3	Dokumen	1	Dokumen	24.667.000	Bidang Penanaman Modal
Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah Yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	1	Daerah	1	Daerah	24.667.000	Bidang Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Cakupan Potensi Yang Dipromosikan	100	%	100	%	466.153.000	Bidang Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	24	Dokumen	8	Dokumen	466.153.000	Bidang Penanaman Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	24	Dokumen	8	Dokumen	466.153.000	Bidang Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian Penanaman Modal	100	%	100	%	20.000.000	Bidang Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1200	Pelaku Usaha	218	Pelaku Usaha	20.000.000	Bidang Penanaman Modal
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan	900	Pelaku Usaha	200	Pelaku Usaha	10.000.000	Bidang Penanaman Modal

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150	Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	10.000.000	Bidang Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur.	100	%	100	%	202.217.000	Bidang Pelayanan dan Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	12	Bulan	12	Bulan	202.217.000	Bidang Pelayanan dan Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Dokumen	1	Dokumen	8.662.000	Bidang Pelayanan
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan	12750	Pelaku Usaha	2000	Pelaku Usaha	146.179.000	Bidang Pelayanan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik						
Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	72	Pelaku Usaha	75	Pelaku Usaha	31.736.000	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	180	Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	15.640.000	Bidang Pelayanan
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Sistem Informasi Yang Dikembangkan	100	%	100	%	48.255.000	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sistem Informasi Pengelolaan Data Yang Dikembangkan	5	Aplikasi	1	Aplikasi	48.255.000	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	5	Dokumen	1	Dokumen	48.255.000	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN DPMPSTSP Terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPSTSP	90	Indeks	88	Indeks	4.554.299.616	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	54	Dokumen	18	Dokumen	38.872.000	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	Dokumen	7	Dokumen	5.000.000	Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	Laporan	11	Laporan	33.872.000	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100	%	100	%	2.968.663.192	Sekretariat
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	23	Orang/bulan	23	Orang/bulan	2.966.663.192	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	Laporan	12	Laporan	3.000.000	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Menerima Pelayanan Kepegawaian Sesuai Prosedur	50	Orang	50	Orang	54.518.000	Sekretariat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50	Orang	54.518.000	Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	252	Paket	42	Paket	488.751.288	Sekretariat

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	26.500.000	Sekretariat
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	223.286.288	Sekretariat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	30.000.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	62.880.000	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	16.585.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	36	Dokumen	12	Dokumen	9.500.000	Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	12	Laporan	120.000.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132	Laporan	36	Laporan	771.045.136	Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	36	Laporan	12	Laporan	182.770.136	Sekretariat
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	36	Laporan	12	Laporan	60.000.000	Sekretariat

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	36	Laporan	12	Laporan	528.275.000	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	20	Unit	18	Unit	229.450.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	16	Unit	16	Unit	100.000.000	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Gedung	2	Gedung	129.450.000	Sekretariat

2. Matriks Renja Perubahan Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2025-2029		Target P-Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi	100	%	100	%	83.665.000	Bidang Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Potensi / Peluang Penanaman Modal yang Telah di Petakan	100	%	100	%	83.665.000	Bidang Penanaman Modal
Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah Yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	1	Daerah	1	Daerah	83.665.000	Bidang Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan	100	%	100	%	236.775.000	Bidang Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	32	Kegiatan	5	Kegiatan	236.775.000	Bidang Penanaman Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	32	Dokumen	5	Dokumen	236.775.000	Bidang Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha	100	%	100	%	15.000.000	Bidang Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal yang disusun	20	Laporan	4	Laporan	15.000.000	Bidang Penanaman Modal

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2025-2029		Target P-Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0	Bidang Penanaman Modal
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	250	Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	15.000.000	Bidang Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan	100	%	100	%	419.020.150	Bidang Pelayanan dan Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Perizinan yang di Terbitkan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	100	%	100	%	419.020.150	Bidang Pelayanan dan Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1	Dokumen	3.299.000	Bidang Pelayanan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2025-2029		Target P-Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	27586	Pelaku Usaha	6086	Pelaku Usaha	315.259.000	Bidang Pelayanan
Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	275	Pelaku Usaha	300	Pelaku Usaha	87.022.150	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	60	Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	13.440.000	Bidang Pelayanan
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	%	100	%	172.932.480	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedia dan Terupdate	100	%	100	%	172.932.480	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan
Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	10	Dokumen	2	Dokumen	172.932.480	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2025-2029		Target P-Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan; Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	88,25 98,72	Indeks	88	Indeks	4.337.825.382	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258	Dokumen	18	Dokumen	27.508.000	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52	Dokumen	7	Dokumen	675.000	Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206	Laporan	11	Laporan	26.833.000	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Deviasai Serapan Anggaran Perangkat Daerah	3.62	%	3.66	%	2.909.289.588,50	Sekretariat
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	33	Orang/bulan	33	Orang/bulan	2.906.289.477,50	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Laporan	12	Laporan	3.000.000	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Layanan Kepegawaian Sesuai Prosedur	45	Orang	43	Orang	54.518.000	Sekretariat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang	43	Orang	54.518.000	Sekretariat

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2025-2029		Target P-Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum	84	Paket	84	Paket	412.215.345,50	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	26.500.000	Sekretariat
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	187.452.990,50	Sekretariat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	30.000.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	62.880.000	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	17.882.355	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	9.500.000	Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	78.000.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	Laporan	36	Laporan	644.844.448	Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	162.769.448	Sekretariat
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	60.000.000	Sekretariat

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2025-2029		Target P-Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung Jawab
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	422.075.000	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	18	Unit	18	Unit	289.450.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	16	Unit	16	Unit	100.000.000	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Gedung	2	Gedung	189.450.000	Sekretariat

D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya

1. Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2025


PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63315
 Telepon : (0351) 891321 SMS Center 08113321222
 Laman : dpmptsp.magetan.go.id Pos-el : dpmptsp@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
 Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : NIZHAMUL, S.E., M.M
 Jabatan : Pj. Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

NIZHAMUL, S.E., M.M

Pihak Pertama,

S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda (P/1c)
 NIP. 196712241988092001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	4.200
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai IKM Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98
3.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMP/TSP	Nilai SAKIP DPMP/TSP Magetan	94,25

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.554.299.616	-
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 24.667.000	-
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 466.153.000	-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 202.217.000	-
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 20.000.000	-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 48.255.000	-
JUMLAH		Rp. 5.315.591.616	

Magetan, 13 Januari 2025

Pj. BUPATI MAGETAN

NIZHAMUL, S.E., M.M

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda (P/1c)
 NIP. 196712241988092001

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318
 Telepon (0351) 881321 SMS Center 08113321222
 Laman : dpmptsp.magetan.go.id Pos-el : dpmptsp@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
 Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HJ. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd
 Jabatan : Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 3 November 2025



HJ. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19671224 196809 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru	6086
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.92
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	96

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.337.825.382	-
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 83.665.000	-
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 238.775.000	-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 419.020.150	-
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 15.000.000	-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 172.932.480	-
JUMLAH		Rp. 5.265.218.012	

Magetan, 3 November 2025



HJ. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda (I/Wc)
 NIP 196712241968092001

E. Pengukuran Kinerja

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025



2. Laporan LHE AKIP 2025



**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**

**SATUAN KERJA:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tripandita No. 17 Magetan, Jawa Timur 63391
Telepon (0351) 897113, Laman inspektorat.magetan.go.id, Pos-el inspektorat@magetan.go.id

Nomor : 700/ ~~350~~ /403.060/2025

26 Juni 2025

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan
di

M A G E T A N

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melaksanakan evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/26.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/29.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/26.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/36.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/29.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara khusus evaluasi atas implementasi SAKIP bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan ruang lingkup, meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
2. Penilaian pengukuran kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi dan teknik evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Metodologi dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta kendala yang ditemukan dalam evaluasi.
2. Teknik evaluasi atas implementasi SAKIP
 - a) Pengumpulan data dan informasi, dilakukan dengan meminta kelengkapan dokumen SAKIP kepada masing - masing Perangkat Daerah dengan mengirimkan *softcopy* ke alamat: <https://si-ksatria.magetan.go.id/> dan pengecekan dokumen yang diunggah melalui : <http://esr.menpan.go.id>
 - b) Tim evaluator melakukan evaluasi sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan Aplikasi Si Ksatria diakses melalui <https://si-ksatria.magetan.go.id/>

- c) Tim evaluator juga melaksanakan konfirmasi kepada beberapa Perangkat Daerah dalam rangka penajaman evaluasi.

F. Evaluator Internal

Evaluasi internal atas implementasi SAKIP Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.

G. Interval Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan Kategori Predikat untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang sangat dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik,

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 - 70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

2. HASIL EVALUASI

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			2024	2025
1)	Perencanaan Kinerja	30%	29.63	27.64
2)	Pengukuran Kinerja	30%	28.00	29.25
3)	Pelaporan Kinerja	15%	12.65	14.16
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	24.63	24.38
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	94.91	95.43
	Kategori		AA	AA
	Interpretasi		Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mendapatkan nilai **95.43** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan**. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

a. Perencanaan Kinerja

Pada poin B. 13 Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable) menantang dan realistis : Terdapat target di tahun 2025 dibawah pencapaian tahun 2024 yaitu Nilai SAKIP (Capaian 2024 : 94,91 , Target 2025 : 94,25)

Pada poin B. 14 belum disusun PK di setiap level jabatan.

b. Pengukuran Kinerja

SKP Kepala Dinas belum diformalkan.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Pada poin B. 13 Penentuan target dalam perencanaan kinerja kedepan agar mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pada poin B. 14 agar disusun PK di setiap level jabatan.

b. Pengukuran Kinerja

Agar SKP Kepala Dinas diformalkan oleh Sekretaris Daerah.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan SAKIP. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami berharap agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan implementasi SAKIP kedepannya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**



ARI WIDYATMOKO, S.E., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 198603 1001

3. Tindak Lanjut LHE AKIP 2025



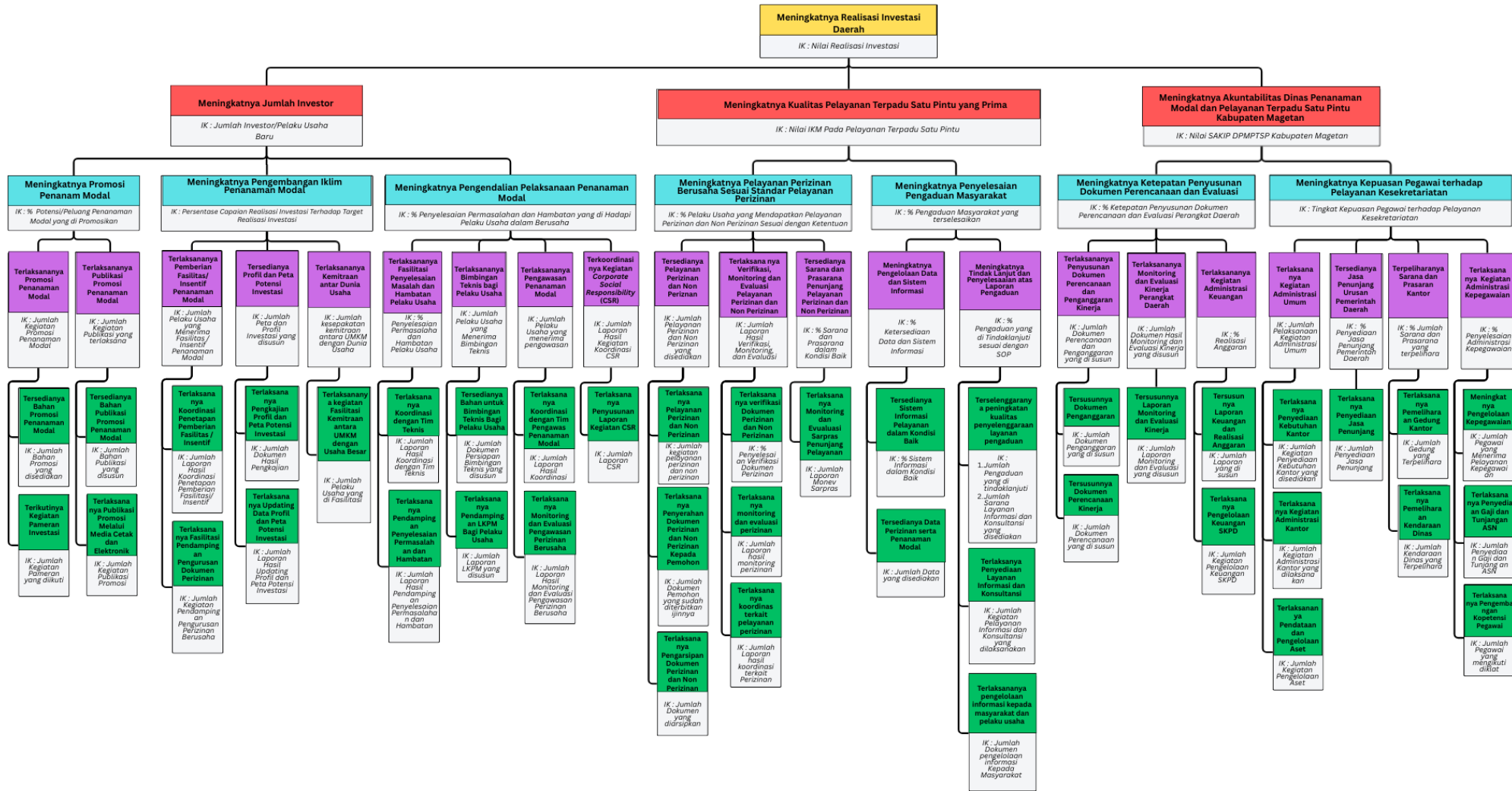
**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Jawa Timur 63318
Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222

Laman dpmptsp.magetankab.go.id, Pos-el dpmptsp@magetankab.go.id

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP INTERNAL OPD TAHUN 2025							
Nama OPD		: DPMPTSP					
NO	CATATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROGRESS	BUKTI DUKUNG <i>(Upload pada Link)</i>	HAMBATAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Perencanaan Kinerja							
1	Pada poin B. 13 Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable) menantang dan realistis . Terdapat target di tahun 2025 dibawah pencapaian tahun 2024 yaitu Nilai SAKIP (Capaian 2024 94,91, Target	Pada poin B. 13 Penentuan target dalam perencanaan kinerja kedepan agar mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.	Dalam penentuan target perencanaan kinerja akan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya	Dilakukan penentuan target perencanaan kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya	https://bit.ly/BuktiDukung-BTLAKIPOPD-2025		
2	Pada poin B. 14 belum disusun PK di setiap level jabatan.	Pada poin B. 14 agar disusun PK di setiap level jabatan	Perjanjian Kinerja akan disusun pada setiap Level Jabatan	Telah Dilakukan Penyusunan Perjanjian Kinerja pada setiap Level Jabatan			
b. Pengukuran Kinerja							
1	SKP Kepala Dinas belum diformalkan	Agar SKP Kepala Dinas diformalkan oleh Sekretaris Daerah	SKP Kepala Dinas akan diformalkan oleh Sekretaris Daerah	SKP Kepala Dinas telah diformalkan oleh Sekretaris Daerah			

F. Pohon Kinerja



G. Rencana Aksi Tahun 2026

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			POKIN LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4											
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru							Investor	6150	1500	1500	1500	1650	6150	
1.1			Meningkatnya iklim investasi di daerah	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi					%	100	25	50	75	100	100	
1.1.1					Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen	1	0	0	1	0	1	
1.1.1.1							Tersusunnya Draft Bahan Substansi RUPM Kabupaten/Kota	Jumlah Draft Materi RUPM (Visi, Arah Kebijakan, Sektor Unggulan) Yang Disusun	Dokumen	1	0	1	0	0	1	
1.1.1.2							Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Penyusunan RUPM	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Disusun	Laporan	1	0	0	1	0	1	
1.1.1.3							Terlaksananya Penyusunan Draft Dokumen RUPM	Jumlah Draft RUPM Yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	1	1	
1.1.1.4							Terlaksananya Pengolahan Dan Analisis Data Potensi Dan Peluang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Potensi Investasi	Dokumen	1	0	0	0	1	1	

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Penanaman Modal Daerah								
1.1.1.5							Terlaksananya Pengolahan Dan Analisis Data Potensi Dan Peluang Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Potensi Investasi	Dokumen	1	0	0	0	1	1
1.2			Meningkatnya Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan					%	100	100	100	100	100	100
1.2.1					Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			Dokumen	5	0	1	2	2	5
1.2.1.1							Terlaksananya Penyusunan dan atau Penyiapan Materi Promosi Penanaman Modal	Jumlah materi promosi yang disiapkan (profil, paparan, konten publikasi,dsb)	Dokumen	5	0	1	2	2	5
1.2.1.2							Terikutinya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Yang Dilaksanakan	Kegiatan	5	0	1	2	2	5
1.2.1.3							Tersusunnya Draf Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Draft Laporan Hasil Kegiatan Promosi	Dokumen	5	0	1	2	2	5
1.2.1.4							Terikutinya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	0	0	0	1
1.3			Meningkatnya Ketertiban	Persentase Penyelesaian					%	100	100	100	100	100	100

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Berusaha di Daerah	Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha											
1.3.1					Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal yang dilaksanakan Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspkesi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			Kegiatan Usaha	50	10	15	10	15	50
					Tersedianya Laporan Kinerja Penanaman Modal di Daerah				Laporan	4	1	1	1	1	4
					Jumlah Laporan CSR yang Tersedia				Laporan	1	0	0	0	1	1
1.3.1.1							Tersusunnya Draft Administrasi Dan Bahan Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Draft Dokumen Administrasi Pengawasan Yang Disiapkan	Dokumen	4	1	1	1	1	4
1.3.1.2							Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan	4	1	1	1	1	4
1.3.1.3							Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan	4	1	1	1	1	4

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.4							Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pelaporan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha Yang Didampingi Dalam Pelaporan LKPM	Kegiatan Usaha	50	10	10	15	15	50
1.3.1.5							Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pelaporan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha Yang Didampingi Dalam Pelaporan LKPM	Kegiatan Usaha	50	10	15	10	15	50
1.3.1.6							Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pelaporan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha Yang Didampingi Dalam Pelaporan LKPM	Kegiatan Usaha	50	10	15	10	15	50
1.3.1.7							Tersusunnya Draft Laporan Hasil Pendampingan LKPM	Jumlah Draf Laporan Hasil LKPM Yang Disusun	Dokumen	4	1	1	1	1	4
1.3.1.8							Tersusunnya Draft Laporan Cooperate Soscial Responsibility (CSR) Pelaku Usaha	Jumlah Draft Laporan CSR Yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	1	1
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu							Skor	98.94	0	0	0	98.94	98.94
2.1			Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan					%	100	100	100	100	100	100

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan											
2.1.1					Terlaksananya Pemberian Pelayanan Perizinan kepada Pemohon	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik			Pelaku Usaha	6150	1500	1500	1500	1650	6150
2.1.1.1							Terlaksananya Layanan Penerimaan Dan Pemberian Informasi Permohonan Perizinan	Jumlah Permohonan Yang Dilayani Sesuai Dengan Standar	Pemohon	1000	250	250	250	250	1000
2.1.1.2							Terlaksananya Layanan Penerimaan Dan Pemberian Informasi Permohonan Perizinan	Jumlah Permohonan Yang Dilayani Sesuai Dengan Standar	Pemohon	1000	250	250	250	250	1000
2.1.1.3							Terlaksananya Pemrosesan Dan Tindak Lanjut Permohonan Perizinan	Jumlah Pemrosesan Dan Tindak Lanjut Permohonan Perizinan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur	Dokumen	1000	250	250	250	250	1000
2.1.1.4							Terlaksananya Pemrosesan Dan Tindak Lanjut Permohonan Perizinan	Jumlah Pemrosesan Dan Tindak Lanjut Permohonan Perizinan Yang	Dokumen	1000	250	250	250	250	1000

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Sesuai Standar Operasional Prosedur							
2.1.1.5							Terlaksananya Verifikasi Dan Validasi Permohonan Perizinan Yang Diajukan	Jumlah Dokumen Permohonan Perizinan Yang Di Verifikasi Dan Validasi	Dokumen	1000	250	250	250	250	1000
2.1.1.6							Tersusunnya Draft Dokumen Perizinan Untuk Disetujui	Jumlah Draft Dokumen Perizinan Yang Dinaikan	Dokumen	1000	250	250	250	250	1000
2.1.1.7							Terlaksananya Penyerahan Dokumen Perizinan Yang Telah Terbit	Jumlah Dokumen Permohonan Yang Dicitak Dan Diserahkan Kepada Pemohon	Dokumen	1000	250	250	250	250	1000
2.1.1.8							Terlaksananya Kegiatan Pengadministrasian Dan Pengarsipan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Perizinan	Jumlah Daftar Dokumen Yang Teradministrasi Dan Diarsipkan Dengan Baik	Dokumen	12	3	3	3	3	12
2.1.1.9							Tersusunnya Laporan Rekapitulasi Perizinan Yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Rekapitulasi Perizinan Yang Disusun	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.1.1.10							Terlaksananya Pelayanan Perizinan Khusus Melalui MPP Digital	Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan Khusus Melalui MPP Digital	%	100	100	100	100	100	100
2.1.1.11							Terlaksananya Pelayanan Perizinan	Jumlah pemohon	Pemohon	600	150	150	150	150	600

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Kewenangan Daerah dan Pendampingan Perizinan Kewenangan Pusan/Provinsi	perizinan yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan							
2.1.1.12							Tersusunnya Laporan Rekapitulasi Layanan Perizinan Khusus	Jumlah Laporan Layanan Perizinan Khusus Yang Disusun	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.1.1.13							Terlaksananya Pelayanan Perizinan Khusus Melalui MPP Digital	Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan Khusus Melalui MPP Digital	%	100	100	100	100	100	100
2.1.1.14							Terlaksananya Pelayanan Perizinan Kewenangan Daerah dan Pendampingan Perizinan Kewenangan Pusan/Provinsi	Jumlah pemohon perizinan yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan	Pemohon	300	75	75	75	75	300
2.1.2						Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		Kegiatan Usaha	10	2	3	2	3	10
2.1.2.1							Tersusunnya Bahan Untuk Pelaksanaan Tinjauan/Survey Lapangan Terkait Perizinan Yang Diajukan	Jumlah Bahan Yang Disiapkan Untuk Peninjauan Lapangan	Dokumen	10	2	3	2	3	10

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.2.2							Terlaksananya Peninjauan/Survey Lapangan Terkait Perizinan Yang Diajukan	Jumlah Kegiatan Peninjauan Lapangan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	10	2	3	2	3	10
2.1.2.3							Terlaksananya Peninjauan/Survey Lapangan Terkait Perizinan Yang Diajukan	Jumlah Kegiatan Peninjauan Lapangan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	10	2	3	2	3	10
2.1.2.4							Tersusunnya Laporan Dan Atau Berita Acara Peninjauan/Survey Yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Dan Atau Berita Acara Yang Disusun	Laporan	10	2	3	2	3	10
2.1.2.5							Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Tim Teknis	Jumlah Kegiatan Rapat Tim Teknis Yang Dilaksanakan	Kegiatan	4	1	1	1	1	4
2.1.2.6							Tersusunnya Draft Laporan Hasil Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Tim Teknis	Jumlah Draft Laporan Yang Disusun	Laporan	4	1	1	1	1	4
2.1.2.7							Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang Disusun	Laporan	1	0	0	0	1	1
2.1.2.8							Tersusunnya Draft Laporan Kinerja PTSP	Jumlah Draft Laporan Kinerja PTSP Yang Disusun	Laporan	4	1	1	1	1	4
2.2			Meningkatnya Ketersediaan Data dan Ketersediaan Sistem Informasi	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi					%	100	100	100	100	100	100

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Penanaman Modal											
2.2.1					Terkelolanya Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan			Dokumen	12	3	3	3	3	12
2.2.1.1							Terlaksananya Tata Kelola Dan Tata Laksana Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Tata Kelola Dan Tata Laksana Teknologi Informasi	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.2.1.2							Terlaksananya Pemeriksaan Kesesuaian Sistem Informasi Secara Berkala	Jumlah Laporan Atas Pemeriksaan Yang Dilaksanakan	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.2.1.3							Terlaksananya Pemeriksaan Kesesuaian Sistem Informasi Secara Berkala	Jumlah Laporan Atas Pemeriksaan Yang Dilaksanakan	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.2.1.4							Terlaksananya Pengembangan Program Aplikasi Pada Sistem Informasi	Jumlah Laporan Atas Kegiatan Pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Yang Dilaksanakan	Laporan	1	0	0	0	1	1
2.2.1.5							Terlaksananya Pengelolaan Dan Analisis Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Secara Berkala	Jumlah Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dikelola Dan Dianalisa	Data	12	3	3	3	3	12

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2.1.6							Terlaksananya Tata Kelola Dan Tata Laksana Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Tata Kelola Dan Tata Laksana Teknologi Informasi	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.2.1.7							Tersusunnya Draft Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Secara Berkala	Jumlah Draft Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Yang Disusun	Laporan	4	1	1	1	1	4
2.2.1.8							Terlaksananya Back Up Data Dan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Backup Data Yang Dilaksanakan	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.2.1.9							Terlaksananya Dokumentasi Dan Pengelolaan Arsip Berkaitan Dengan Data Dan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Rekapitulasi Data Dan Informasi Yang Diarsipkan	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.2.1.10							Terlaksananya Pemeriksaan Kesesuaian Sistem Informasi Secara Berkala	Jumlah Laporan Atas Pemeriksaan Yang Dilaksanakan	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.2.2						Terkelolanya Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan		Dokumen	12	3	3	3	3	12
2.2.2.1							Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan	Persentase Permasalahan Perizinan Dan Non Perizinan	%	100	100	100	100	100	100

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Perizinan Dan Non Perizinan	Yang Difasilitasi							
2.2.2.2							Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Yang Disusun	Laporan	12	12	12	12	12	12
2.2.2.3							Terlaksananya Pelayanan Konsultasi Dan Pemberian Informasi Pada Masyarakat	Jumlah Laporan Rekapitulasi Konsultasi Yang Di Susun	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.2.2.4							Terlaksananya Publikasi Informasi Secara Berkala Pada Sistem Informasi Dan Sosial Media	Jumlah Laporan Hasil Publikasi Yang Dilaksanakan	Laporan	12	3	3	3	3	12
2.2.2.5							Terlaksananya Penyusunan Dan Menyajikan Data/Informasi Perizinan Berusaha Dalam Bentuk Tabel, Grafik, Dan Ringkasan Analisis Untuk Di Publikasi	Jumlah Laporan Dan Informasi yang siap dipublikasikan	Laporan	12	3	3	3	3	12
3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP							Nilai	95.45	0	0	0	95.45	95.45
3.1			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan					Skor	88	0	0	0	88	88

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Birokrasi Yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik Yang Efektif Dan Efisien	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran					%	98.68	0	0	0	98.68	98.68
3.1.1					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	9	3	3	2	1	9
3.1.1.1							Tersusunnya Draft Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Draft Dokumen Perencanaan Yang Disusun	Dokumen	9	3	3	2	1	9
3.1.1.2							Tersusunnya Draft Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Draft Dokumen Perencanaan Yang Disusun	Dokumen	9	3	3	2	1	9
3.1.2					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan	39	10	10	10	9	39
3.1.2.1							Tersusunnya Draf Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Draft Laporan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	Laporan	39	10	10	10	9	39
3.1.2.2							Tersusunnya Draf Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Draft Laporan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	Laporan	39	10	10	10	9	39
3.1.2.3							Tersusunnya Draf Laporan Evaluasi	Jumlah Draft Laporan Monitoring Dan	Laporan	12	3	3	3	3	12

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Yang Disusun							
3.1.3					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN			Orang/Bulan	33	33	33	33	33	33
3.1.3.1							Tersusunnya Data Pemenuhan Gaji ASN Secara Akurat Dan Tepat Waktu	Prosentase Pemenuhan Gaji ASN Yang Akurat Dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
3.1.4					Terlaksananya Bimbingan Tekns Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Pegawai	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Tekns Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Orang	45	0	0	45	0	45
3.1.4.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100
3.1.5					Tersedianya Perlengkapan Kelistrikan dan Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan			Paket	12	3	3	3	3	12
3.1.5.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Komponen Kelistrikan Dan Penerangan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Komponen Kelistrikan Dan	Dokumen	12	3	3	3	3	12

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Penerangan Kantor Yang Disiapkan							
3.1.6					Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			Paket	12	3	3	3	3	12
3.1.6.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kinerja Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kinerja Administrasi Kantor Yang Disiapkan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
3.1.6.2							Terlaksananya Pencatatan Stock Opname Barang	Jumlah Laporan Hasil Pencatatan Stock Opname Barang	Laporan	12	3	3	3	3	12
3.1.6.3							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kinerja Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kinerja Administrasi Kantor Yang Disiapkan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
3.1.6.4							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Pemenuhan	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan	Dokumen	12	3	3	3	3	12

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Kebutuhan Pendukung Kinerja Administrasi Kantor	Dengan Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kinerja Administrasi Kantor Yang Disiapkan							
3.1.7					Tersedianya Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan			Paket	12	3	3	3	3	12
3.1.7.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Yang Disiapkan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
3.1.8					Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan			Paket	12	3	3	3	3	12
3.1.8.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Makanan Dan Minuman Serta Logistik Kantor Lainnya	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Makanan Dan Minuman Serta Logistik Kantor Lainnya Yang Disiapkan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
3.1.9					Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan			Paket	12	3	3	3	3	12

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.9.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disiapkan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
3.1.10					Tersedianya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			Laporan	12	3	3	3	3	12
3.1.10.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Disiapkan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
3.1.11					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan			Laporan	12	3	3	3	3	12
3.1.11.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Dan Pembayaran Tagihan	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan	Dokumen	12	3	3	3	3	12

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Dan Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disiapkan							
3.1.12					Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			Laporan	12	3	3	3	3	12
3.1.12.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disiapkan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
3.1.12.2							Terlaksananya Pemeriksaan Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	3	3	3	3	12
3.1.12.3							Terlaksananya Pemeriksaan Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pemeliharaan Peralatan Dan	Laporan	12	3	3	3	3	12

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Perlengkapan Kantor							
3.1.13					Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Laporan	12	3	3	3	3	12
3.1.13.1							Tersusunnya Draft Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Draft Laporan Keuangan Yang Disusun	Laporan	1	1	0	0	0	1
3.1.13.2							Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi Keuangan	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan	Laporan	12	3	3	3	3	12
3.1.14					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan			Laporan	12	3	3	3	3	12
3.1.14.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Yang Disiapkan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
3.1.15					Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya			Unit	15	2	3	5	5	15

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.15.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas	Dokumen	12	3	3	3	3	12
3.1.16					Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	2	1	1	0	0	2
3.1.16.1							Terlaksananya Administrasi Berkaitan Dengan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Berkaitan Dengan Pemeliharaan Gedung Kantor	Dokumen	2	1	1	0	0	2
3.1.16.2							Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Kegiatan Pengamanan yang dilaksanakan	Bulan	12	3	3	3	3	12